



ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA) KABUPATEN TEBO

Maulana Yusuf^a, Mellya Embun Baining^b, Nurul Pebriyanti^c

^a FEBI / Akuntansi Syariah, nurulpebri505@gmail.com, UIN Jambi

ABSTRAK

The Government Accounting System at the Local Government level is regulated by the Governor / Regent / Mayor, referring to the Regional Government regarding the regional financial management that is guided by PP No.71 in 2010. Government reports according to SAP there are seven components, namely: Budget Realization Report (LRA), Balance Sheet, Report Operations (Lo), Reports of Equity Change (LPE), Cash Flow Reports (LAK), and Notes for Financial Statements. This research is to find out how the application of Regional Financial Accounting Systems in Bakearuda Tebo Regency, what are the obstacles and the solutions to the Tebo Regency Government. The type of research used in this study is a qualitative descriptive study with a case study approach. Qualitative descriptive research is carried out to conclude or describe research objects based on the facts that are tread or good. Data to be carried out by observation and interviews and detect data on the procedure for managing accounting information, as well as data on the company in the form of a common company.

Keywords: SIMDA, Accounting System, PP No.71

Abstrak

Sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada PP No.71 tahun 2010. Laporan pemerintah menurut SAP ada tujuh komponen yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada BAKEUDA Kabupaten Tebo, apa saja hambatan dan bagaimana solusi dari pemerintah Kabupaten Tebo. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara serta mengumpulkan data-data dalam prosedur pengelolaan data informasi akuntansi, serta data-data pada perusahaan dalam bentuk gambaran umum perusahaan.

Kata Kunci: SIMDA, Sistem Akuntansi, PP No.71

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP di tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati atau walikota, yang mengacu pada PERDA (Peraturan Daerah) tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan demi penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada Empat karakteristik kualitatif tersebut diantaranya : Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan Dapat dipahami.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Penelitian ini erupakan penelitian yang embahas tentang bagaimana sistem akuntansi yang ada pada setiap entitas.

Berbagai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan terkait dengan analisis sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah diantaranya pernah dilakukan oleh fajar dimana penelitiannya dlakukan pada pemerintahan kota bandung dengan judul pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung dengan hasil penelitiannya tersebut membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah kabupaten bandung mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangannya.

2.1.2. Heading Level Ketiga

Winda meneliti tentang analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada badan kepegawaian kota padang. Dan menyimpulkan bahwa penerapan sistem pencatatan sudah sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006 namun belum mengikuti standar yang telah ditetapkan yaitu peraturan pemerintah bomor 71 tahun 2010.

2.1.3. Penulisan Referensi

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tien meneliti tentang analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada bagian keuangan pemerintah kabupaten pacitran, menyimpulkan bahwa pemda masih belum melaksanakan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan sistem yang baru yaitu sistem double entry dan basis akrual.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah objek alamiah, atau natural *setting*, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini biasa disebut metode naturalistik.

Objek penelitian ini fokus pada sistem akuntansi keuangan pada badan keuangan (BAKEUDA) Kabupaten Tebo. Hal ini peneliti beralasan untuk mengambil objek penelitian di BAKEUDA Kabupaten Tebo dikarenakan BAKEUDA adalah induknya dari 21 kantor dinas yang ada di Kabupaten Tebo. Dari hasil wawancara peneliti dengan staf pengelola sistem akuntansi keuangan di Kabupaten Tebo menjelaskan bahwa masih ada beberapa kantor dinas yang sering terlambat mengumpulkan hasil laporan keuangannya ke kantor dinas BAKEUDA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pernyataan

Pada penerapan akuntansi berbasis akrual menurut PP No.71 tahun 2010 sangat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan dan juga memperhatikan suatu laporan keuangan yang betul-betul sesuai dengan kemampuan SKPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Romlan SE.M.Ak selaku kepala Badan Keuangan Akuntansi dan Pelaporan keuangan pada BAKEUDA yaitu :

“ penerapan akuntansi berbasis akrual ini sangat membantu karena sebelum menggunakan berbasis akrual ini kita menggunakan kas basic dimana kas basic ini terlebih dahulu kita mencari yang mana yang akan dimasukkan kedalam neraca, berbeda dengan akrual dimana sudah jelas yang akan dimasukkan kedalam neraca

4.2 Tabel hasil penelitian

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017-2021

No	Entitas	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemprov jambi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pemkot jambi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Pemkot sungai penuh	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Pemkab Batang hari	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Pemkab Bungo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

6	Pemkab Kerinci	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Pemkab Muaro Jambi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Pemkab Merangin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Pemkab Sarolangun	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Pemkab Tanjung Jabbar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Pemkab Tanjung Tim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Pemkab Tebo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : IHPD Provinsi Jambi

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberi Pendapat

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem penyusunan laporan keuangan pada BAKEUDA kabupaten Tebo telah menggunakan aplikasi sistem manajemen daerah (SIMDA) yang lebih memudahkan bagian keuangan dan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. BAKEUDA kabupaten Tebo secara umum telah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrual dan permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Ucapan Terima Kasih

Kepada Ibu Mellya Embun Baining dan Bapak Maulana Yusuf, yang begitu berjasa bagi peneliti. Jajaran dosen yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan arahan dalam belajar selama kuliah dan semasa pengerjaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ditulis mengikuti format *IEEE style* berikut:

Referensi Cetak:

Buku

Bakeuda.go.id

Baldric Siregar, "Akuntansi Sektor Publik Edisi 2" (Penerbit UPP STM YKPN. Yogyakarta, 2017).

Amin, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan Pemerintahan yang Baik di Daerah*, 2018.

Daerah dkk., "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2011). Jakarta."

Deddi, *Akuntansi Sektor Publik, Pengertian Akuntansi Pemerintahan*. (Pustaka baru press,

Hafis Abdul, "Akuntansi Pemerintahan Daerah" (Bandung: alfa beta, 2007).

Hasanah, dan Achmad. *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: IN Media, 2017

Halim Abdul, “*Akuntansi Sektor Publik, Teori Konsep dan Aplikasi.*” (Indonesia: Salemba Empat, 2012).

Artikel dalam Buku

- Apandi dan Fajar, “*Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.*”
- Amelia Tirta Yuningsih, “*evaluasi penerapan PP No.71 tahun 2010 tentang SAP berbasis AkruaI dalam penyajian Laporan Keuangan politeknik kesehatan makassar*“, skripsi, makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Dwi Harini, Slamet Bambang Riono Dan Muhammad Syaifulloh, “*Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes,*” Universitas Muhadi Setiabudi (Umus) Brebes, t.t.
- Puspita Sari Winda, “*analisa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada badan kepegawaian daerah kota padang*” (phd thesis, universitas andalas, 2011).
- Putriasri Pujanira & Abdullah Taman, “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy,*” Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.
- Rima Nazriyati Athar, “*Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau,*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau., t.t.
- R. Nelly Nur Apandi dan Adrianus Fajar, “*Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung,*” aset 386 (2010).